

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN MODERATING THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE, UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE QUALITY OF REGIONAL FINANCIAL REPORT

PERAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM MEMODERASI PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Putri Alminanda

Marfuah

Email: marfuah@uii.ac.id

Universitas Islam Indonesia

Jalan: Ringroad Utara Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta 55283

ABSTRACT

The main objective of this study is to examine the role of organizational commitment variable in moderating the influence of human resource competence, utilization of information technology and internal control system on the quality of regional financial report in Bantul Regency. The data collection of this study using questionnaires. Questionnaire submitted to 96 of employees working in accounting/finance in Bantul Regency. Number of questionnaires returned and filled in completely are 90. Based on the results of hypothesis testing with moderated analysis regression (MRA) is summarized as follows: (1) internal control system and utilization of information technology have a significant positive effect on the quality of regional government financial report and (2) organizational commitment strengthen internal control system and utilization of information technology to the quality of regional government financial report . While the competence of human resources has no significant effect on the quality of regional government financial report.

Keywords: internal control system, organizational commitment, quality of financial report, utilization of information technology

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji peran variable komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Bantul. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 96 pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan. Jumlah kuesioner yang kembali dan diisi dengan lengkap sebanyak 90. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan MRA disimpulkan sebagai berikut: (1) sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan (2) komitmen organisasi memperkuat sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang memiliki tujuan menyediakan/memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan untuk publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Nurillah, 2014). Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Pemerintah adalah entitas pelaporan (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan, penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat serta terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut (Nurillah, 2014). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas wewenangnya yang telah diberikan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu dalam bentuk Laporan Keuangan. Hasil konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2017). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2017, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengunjalaporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa isi laporan keuangan pemerintah secara umum menggambarkan informasi keuangan dan kejadian dalam satu periode untuk pembambilan keputusan dan disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD) selanjutnya dipublikasikan kepada rakyat sebagai pemilik dana yang digunakan oleh pemerintah.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penulis menemukan kasus yang terjadi di pemerintah daerah terjadi permasalahan. Kasus penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang kurang memenuhi prinsip akuntabilitas seperti adanya laporan mengenai sebagian besar laporan keuangan yang memiliki masalah dalam keadministrasian. Bukti permasalahan yang didapatkan adalah melalui observasi pada laporan keuangan yang disusun oleh staf administrasi pada 40 desa di Bantul yang terbukti mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan dana desa. Selanjutnya Kepala Inspektorat Bantul menyampaikan bahwa sebagian besar laporan keuangan yang diperiksa tersebut ditemukan masalah, khususnya masalah administrasi. Antara lain terlambatnya penyampaian laporan dana desa dan sejumlah persoalan administrasi lainnya.

Fenomena pada permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah memerlukan perbaikan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk kedepannya. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Nurillah, 2014). Faktor kedua yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh

individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya (Nurillah, 2014). Menurut Loli (2017) pemanfaatan teknologi informasi akan menyebabkan peningkatan dalam hal pemrosesan transaksi menjadi lebih cepat dan keakurasian dalam perhitungan juga menjadi lebih besar. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe*, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Arfianti, 2011). Namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana (Nurillah, 2014). Permasalahan ini yang mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah yang belum optimal digunakan oleh staf akuntansi.

Sebagai wujud dalam pencapaian tujuan organisasi, komitmen organisasi merupakan faktor yang memiliki peranan penting. Komitmen organisasi merupakan keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi akan menunjukkan kesediaan untuk mempertahankan keanggotannya dalam organisasi dan berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Komitmen Organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pegawai atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pegawai membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi (Andrianto, 2017). Robbins (2008) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mampu menciptakan sikap kerja dari para karyawannya dengan memegang komitmen untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan keberadaan serta fungsi dari dibentuknya birokrasi pemerintahan daerah dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap bekerja di kantor pemerintahan tersebut dengan tetap memegang prinsip akuntabilitas terutama saat melakukan penyusunan laporan keuangan.

Dalam penelitian ini komitmen organisasi berperan sebagai variabel pemoderasi karena komitmen organisasi memiliki fungsi untuk memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Komitmen organisasi yang baik dapat mempengaruhi organisasinya untuk mencapai tujuannya. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas merupakan salah satu tujuan organisasi, sehingga pemerintah daerah akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi agar kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah lebih baik dari sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan dengan motivasi untuk mengembangkan beberapa penelitian sebelumnya dengan fokus utama untuk menguji peran variabel komitmen organisasi dalam pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran variabel komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau keuangan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari Kepala Sub.bag. keuangan, Akuntan (pembukuan), dan Bendahara di SKPD Kabupaten Bantul. Berikut ini adalah jumlah populasi pegawai yang akan menjadi subjek penelitian pada 32 SKPD Kabupaten Bantul :

Tabel 1
SKPD Kabupaten Bantul

NO	SKPD	A	B	C	Jumlah
1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	1	3
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	1	1	1	3
3	Badan Keuangan Aset Daerah	1	1	1	3
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1	3
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	3
6	Inspektorat	1	1	1	3
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1	1	1	3
8	Dinas Kesehatan	1	1	1	3
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	1	3
10	Dinas Perhubungan	1	1	1	3
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	1	3
12	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	1	1	3
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1	1	1	3
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	1	3
15	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1	1	1	3
16	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1	3
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya Masyarakat dan Desa	1	1	1	3
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	3
19	Dinas Perdagangan	1	1	1	3
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1	1	1	3
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1	1	1	3
22	Dinas Kebudayaan	1	1	1	3

23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1	3
24	Dinas Pariwisata	1	1	1	3
25	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1	3
26	Sekretariat DPRD	1	1	1	3
27	PD Aneka Dharma	1	1	1	3
28	PDAM	1	1	1	3
29	RSUD Panembahan Senopati	1	1	1	3
30	Bank Bantul	1	1	1	3
31	Bank BPD Bantul	1	1	1	3
32	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	1	1	1	3
	Jumlah	32	32	32	96

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul (2017)

Keterangan: A : Kepala Sub.bag Keuangan, B : Akuntan, C : Bendahara

Jumlah sampel penelitian dihitung dengan menggunakan rumus Slovin menurut Sugiyono (2012) sebagai berikut :

$$n = N / (1 + N e^2)$$

$$n = 96 / (1 + 96 \times 0.052)$$

$$n = 77$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 77.

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode distribusi langsung (*direct distribution method*) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mendatangi para responden secara langsung untuk menyerahkan atau mengumpulkan kembali kuisioner.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel pemoderasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LK). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Komitmen organisasi (KO) dalam penelitian ini berperan sebagai variable pemoderasi. Setiap variable penelitian diukur menggunakan pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 4 dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Berikut definisi operasional dan pengukuran dari masing-masing variable:

1. Kualitas Laporan Keuangan (LK)

Terdapat 4 (empat) indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (5) dapat dipahami. Untuk mengukur variable kualitas laporan keuangan (LK) digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Andrianto (2017) yang terdiri dari 11 item pertanyaan.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi SDM mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Nurillah, 2014). Menurut Alimbudiono (2004). Indikator variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi (1) latar belakang pendidikan, (2) pelatihan, (3) pengalaman, dan (4) tanggung jawab. Untuk mengukur kompetensi sumber daya manusia (SDM) digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Andrianto (2017) yang terdiri dari 9 item pertanyaan.

3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah. Menurut PP No. 60 Tahun 2008. Indikator variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Untuk mengukur variable SPI digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Andrianto (2017)

yang terdiri dari 10 item pertanyaan.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) adalah penggunaan teknologi informasi berupa komputer dan jaringan secara optimal yang digunakan manusia untuk mempermudah dan mempercepat tugas serta meningkatkan kinerja. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) menurut Suyanto (2005), mencakup (1) penggunaan komputer dan, (2) jaringan. Untuk mengukur variable pemanfaatan teknologi informasi (TI) digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Andrianto (2017) yang terdiri dari 6 item pertanyaan.

5. Komitmen organisasi (KO)

Komitmen organisasi adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Menurut Robbins (2008) Indikator Komitmen Organisasi meliputi (1) komponen afektif, (2) komponen normatif, dan (3) komponen berkelanjutan. Untuk mengukur variable komitmen organisasi (KO) digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Andrianto (2017) yang terdiri dari 8 item pertanyaan.

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan persamaan sebagai berikut:

$$LK = \alpha + \beta_1SDM + \beta_2SPI + \beta_3TI + \beta_4(SDM.KO) + \beta_5(SPI.KO) + \beta_6(TI.KO) + e$$

Keterangan :

LK = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia

SPI = Sistem Pengendalian Intern

TI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

KO = Komitmen Organisasi

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA). Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil pengujian validitas dengan Pearson Correlations menunjukkan bahwa semua variabel menghasilkan koefisien korelasi di atas 0,5 dan signifikan. Demikian juga uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach Alpha menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa data mempunyai kualitas yang baik untuk dianalisis lebih lanjut.

Langkah berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik model regresi yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji statistik kolmogorov-smirnov Hasil uji normalitas data dengan Kolmogorof Smirnov Test menunjukkan bahwa nilai Z sebesar 0,870 dengan sig. (2-tailed) sebesar 0,436 seperti disajikan pada tabel 04. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 . Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini terbebas dari gejala multikolinieritas.

Hasil uji asumsi heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gletser menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai sig. $> 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi dan rentang kategori. Tabel 2 berikut menyajikan hasil analisis statistic deskriptif variabel penelitian.

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation	Keterangan
LK	90	2.82	4.00	3.32	0.314	Sedang
SDM	90	2.33	4.00	3.03	0.328	Sedang
SPI	90	2.70	4.00	3.20	0.301	Sedang
TI	90	2.67	4.00	3.63	0.387	Tinggi

KO	90	2.00	4.00	3.04	0.397	Sedang
Valid N	90					

Sumber : Hasil olah data, 2018

Adapun rentang kategori dari setiap variabel penelitian disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Tabel Kategori Skor Variabel

Variabel	Rentang Kategori		
	Rendah	Sedang	Tinggi
LK	2.82 – 3.21	3.32 – 3.48	3.49 – 4
SDM	2.33 – 2.88	2.89 – 3.26	3.27 – 4
SPI	2.70 – 3.13	3.14 – 3.42	3.43 – 4
TI	2.67 – 3.11	3.12 – 3.41	3.42 – 4
KO	2.00 – 2.67	2.68 – 3.12	3.13 – 4

Sumber : Hasil olah data, 2018

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3, diketahui bahwa variabel kualitas laporan keuangan (LK), kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian intern (SPI), dan komitmen organisasi (KO) termasuk dalam kategori sedang. Sementara variable pemanfaatan teknologi informasi (TI) termasuk dalam kategori tinggi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi moderasi disajikan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Prediksi Arah	Koef. Reg	t -stat.	Sig-t	Kesimpulan
Constanta		1.901	4.105	0.000	
SDM	+	-.025	-0.302	0.763	Ha ₁ tidak didukung
SPI	+	0.217	2.039	0.045	Ha ₂ didukung
TI	+	0.164	2.058	0.043	Ha ₃ didukung
SDM.KO	+	0.051	0.590	0.557	Ha ₄ tidak didukung
SPI.KO	+	0.152	2.376	0.020	Ha ₅ didukung
TI.KO	+	0.170	2.453	0.016	Ha ₆ didukung

F statistik = 10.088; Sig. F= 0.000; Adj. R Square = 0.380

Sumber: Hasil olah data, 2018

$$LK = 1,901 - 0,025SDM + 0,217SPI + 0,164TI + 0,051 SDM*KO + 0,152 SPI*KO + 0,170TI*KO$$

Adapun pembahasan hasil pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis 1 (H1) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Bantul maka tidak mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wayan, (2017) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian Aditya (2017) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah.

Hasil ini kemungkinan disebabkan karena tingkat kompetensi yang dimiliki di bidang keuangan pada SKPD Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Sementara dalam proses penyusunan laporan keuangan pada SKPD Bantul telah didukung dengan teknologi informasi yang berfungsi untuk membuat laporan keuangan sehingga pegawai keuangan di SKPD Bantul yang bertugas membuat laporan keuangan tidak harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bidang akuntansi karena proses akuntansi seluruhnya telah dikerjakan oleh sistem (SAKD). Pegawai SKPD Bantul dalam hal ini hanya menginput data saja. Dengan adanya sistem ini menyebabkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan tanggungjawab SKPD sebagai entitas akuntansi tidak sepenuhnya terlaksana karena telah dikerjakan oleh sistem.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil pengujian hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian intern di Kabupaten Bantul maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu pemerintah daerah di Kabupaten Bantul harus melakukan pengendalian intern yang baik yang baik untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal. Dengan adanya pengendalian intern

yang efektif dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sehingga informasi yang dihasilkan pada laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis 3 (H3) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa semakin baik dalam memanfaatkan teknologi informasi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Loli (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Komputer dan jaringan merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan komputer dan jaringan akan mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat terselesaikan tepat waktu. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan akan memberikan nilai informasi menjadi relevan dan laporan keuangan menjadi berkualitas.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada SKPD Kabupaten Bantul termasuk kategori tinggi. Proses akuntansi dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan telah dilakukan secara komputerisasi dengan sistem (SAKD) dan jaringan komputer yang terpasang telah dimanfaatkan secara maksimal pada SKPD Kabupaten Bantul sebagai penghubung dalam pengiriman data atau informasi yang dibutuhkan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi.

Hasil pengujian hipotesis 4 (H4) menunjukkan bahwa interaksi variabel kompetensi sumber daya manusia dengan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki SKPD Kabupaten Bantul maka tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2017) yang menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Artinya semakin tinggi atau rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki karyawan di SKPD Kabupaten Bantul tidak meningkatkan atau menurunkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya. Komitmen Organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kemungkinan disebabkan karena kurangnya penghargaan bagi para pegawai yang berprestasi, penghasilan dan tunjangan yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja pegawai sehingga kemampuan yang dimiliki pegawai dalam bidang akuntansi tidak digunakan secara maksimal.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi.

Hasil pengujian hipotesis 5 (H5) menunjukkan bahwa interaksi variabel sistem pengendalian intern dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki maka dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi yang memoderasi sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Komitmen Organisasi dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena seorang pegawai yang berkomitmen tinggi terhadap tujuan organisasinya akan mempengaruhi tindakan dan kinerjanya, yaitu mewujudkan pengendalian intern yang memadai dalam memberikan keyakinan tentang keandalan dan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi.

Hasil pengujian hipotesis 6 (H6) menunjukkan bahwa interaksi variabel pemanfaatan teknologi dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi

yang dimiliki maka dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suamirka (2016) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (SIKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi dapat memperkuat pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena jika seorang pegawai memiliki komitmen organisasi yang tinggi terhadap tujuan organisasinya akan dapat mempengaruhi tindakan dan kinerjanya, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sistem akuntansi (SAKD) dan menggunakan jaringan dengan tepat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap 6 hipotesis, dihasilkan 4 hipotesis yang didukung data yaitu H2, H3, H5 dan H6. Sedangkan 2 hipotesis lainnya, yaitu H1 dan H4 tidak didukung data. Oleh karena itu simpulan penelitian ini adalah: (1) Sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informati mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (2) Komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (3) Kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian juga komitmen organisasi tidak berhasil memperkuat pengaruh kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bantul, selain dengan memperbaiki sistem pengendalian intern dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi juga dengan meningkatkan komitmen organisasi para pegawai yang bekerja di bidang akuntansi/keuangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Artinya bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki SKPD Kabupaten Bantul tidak mampu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian intern yang ada pada SKPD Kabupaten Bantul akan meningkatkan kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada SKPD Kabupaten Bantul akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Interaksi variable Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa Komitmen Organisasi yang tinggi atau rendah tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Interaksi variable Sistem Pengendalian Intern dengan Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi yang tinggi dapat memperkuat Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Interaksi variable Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen organisasi yang dimiliki SKPD Kabupaten Bantul yang tinggi dapat memperkuat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Saran

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objeknya, tidak hanya di Kabupaten Bantul melainkan seluruh SKPD yang ada di Provinsi Yogyakarta agar dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang organisasi sektor public.

Nilai Adj. R Square sebesar 0,380 menunjukkan bahwa besarnya kemampuan 3 (tiga) variable independen yang terdiri dari kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan 1 (satu) variable pemoderasi yaitu dan komitmen organisasi dalam menjelaskan variasi variable dependen yaitu kualitas laporan keuangan adalah sebesar 38%. Sedangkan sisanya sebesar 62% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang masuk dalam model penelitian ini. Oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel independen, misalnya standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Sanjaya. 2017. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi (Studi Kasus SKPD Kabupaten Kampar)" dalam *JOM Fekon Volume 4 Nomor 1* (hlm. 369-372).
- Alimbudiono, Ria, S. dan Fidelis. (2004). "Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik." *jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02.* 18-30.
- Andrianto, Elvin. 2017. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman)"
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- BPK RI. (2016). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*. Diakses 12 20, 2016. <http://www.bpk.go.id/ihps>.
- Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintahan Kabupaten Bantul, <https://www.bantulkab.go.id/pemerintahan/pejabat.html>. Diakses pada 2 November 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017" Standar Akuntansi Keuangan"
- Loli, Darwanis, Syukriy. 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah)" dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 3 Nomor 2* (hlm. 186-192). Aceh: ISSN. 2502-6976
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurillah, As Syifa. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)".
- Robbins SP, dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suarmika, I Gusti Lanang. 2016. "Kemampuan Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem".
- Sugiyono, 2014, *Statistika untuk Penelitian*. CV .Alfabeta: Bandung.
- Suyanto. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Wayan, Gusti. 2017. "Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli" dalam *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1*. Denpasar: ISSN: 2302-8556